

PEMETAAN KONDISI KERAWANAN PANGAN DI TINGKAT WILAYAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

(Food Insecurity Conditions Mapping in Bojonegoro Regency)

Suprapti Supardi, Erlyna Wida Riptanti, Aulia Qonita

ABSTRACT

This study aimed to map the condition of food insecurity in Bojonegoro region of Bojonegoro. The research design was exploratory research, which was conducted in Bojonegoro. The data used were secondary data issued by the Food Security Agency in Bojonegoro District. The retrieving method of research location was purposively where Bojonegoro suffered flooding almost every year. The result showed that based on the results of the analysis of FNS (Food and Nutrition Awareness System) in the classification of food security mapping in Bojonegoro showed that out of 28 districts just as much as 9 districts which were yellow, while 19 districts were shown in green. A total of nine districts that had a yellow food security map showed that the area was not good conditions for food security which included sub Ngraho, Sekar, Gondang, Ngasem, Kepohbaru, Baureno, Sumberejo, Balen and Malo. From 19 districts that constituted the general overview of Bojonegoro indicated that food security conditions of the area was good.

Keywords: mapping, food insecurity, region, food security

PENDAHULUAN

Bagi sekitar 60 persen penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan, kebutuhan pangannya berbasis sumber daya lokal, tak terkecuali rumah tangga petani di daerah aliran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro. Jumlah penduduk di Bojonegoro sekitar 1,3 juta orang dimana mayoritas merupakan petani padi. Rumah tangga petani di daerah tersebut pada umumnya pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari produksi tanaman pangan sendiri dan membeli bahan pangan (www.bojonegoro.go.id).

Kabupaten Bojonegoro memiliki sumberdaya manusia dan sumberdaya alam sebagai faktor yang digunakan dalam pembangunan di sektor pertanian. Sumberdaya ini mendapat ancaman dari faktor eksternal berupa bencana dalam bentuk banjir. Kondisi ini hampir terjadi setiap tahunnya (Agustono, 2011). Terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami bencana banjir ini yang terjadi hampir setiap tahunnya, dimana kecamatan tersebut adalah Kecamatan Margomulyo, Ngraho, Padangan, Kasiman,

Malo, Purwosari, Kalitidu, Dander, Bojonegoro, Trucuk, Kapas, Balen, Sumberejo, Kanor dan Boureno. Selain menggenangi rumah penduduk, banjir juga menggenangi lahan pertanian sampai berhari-hari. Padahal menurut Harper *et.all* (1986) menyatakan bahwa ketersediaan pangan terutama tergantung pada (a) cukup luas lahan untuk menanam tanaman pangan, (b) penduduk untuk menyediakan tenaga, (c) uang untuk menyediakan modal pertanian yang diperlukan, (d) tenaga terampil untuk membantu meningkatkan baik produksi pangan maupun distribusi yang merata. Dengan bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya maka menyebabkan ketahanan pangan di tingkat wilayah akan terganggu.

Kerawanan pangan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu kerawanan pangan yang bersifat kronis dan sementara (World Bank, 1986 dalam Suryanan, 2003). Kerawanan pangan terjadi di suatu wilayah secara berulang-ulang dengan kondisi sumberdaya alam dan manusianya yang tidak mendukung. Sedangkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara sementara

dikenal sebagai kerawanan pangan sementara (*transient food insecurity*). Bencana alam yang terjadi tiba-tiba, bencana yang terjadi secara bertahap, perubahan harga atau guncangan terhadap pasar, epidemic penyakit, konflik sosial dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan sementara. Kerawanan pangan sementara dapat berpengaruh terhadap sebagian atau semua dimensi ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan penyerapan pangan. Kerawanan pangan sementara dapat juga dibagi menjadi dua sub-kategori: menurut siklus, di mana terdapat suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya, "musim paceklik" yang terjadi dalam periode sebelum panen, dan sementara, yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek seperti kekeringan atau banjir. Kerawanan pangan sementara inilah yang terjadi pada rumah tangga petani yang tinggal di daerah aliran sungai Bengawan Solo di Bojonegoro.

Terdapat ketimpangan pangan antar daerah dan golongan masyarakat, sehingga ketersediaan pangan yang cukup di tingkat makro (negara, wilayah, pasar) tidak menjamin ketersediaan yang cukup di tingkat mikro (individu/rumah tangga) karena adanya rintangan kemampuan akses pangan yang tersedia cukup di pasar. Ketimpangan pangan yang semakin besar menjadi indikasi meningkatnya resiko kekurangan konsumsi pangan dan terjadinya rawan pangan. Rintangan kemampuan individu dan atau rumah tangga untuk akses pangan cukup jumlah, mutu dan ragamnya terutama adalah daya beli terkait dengan harga pangan dan pendapatan serta daya jangkauan terkait dengan kesulitan lokasi/daerah rawan (Soetrisno, 1995; 1998; FAO, 1996; Arifin, 2004).

Banjir yang hampir terjadi setiap tahunnya menyebabkan kehilangan hasil produksi pertanian, stok bahan pangan, pendapatan dan harta benda yang dimiliki oleh rumah tangga petani di daerah rawan banjir. Tanaman padi dan jagung yang merupakan komoditas utama di daerah ini rentan terhadap banjir dan genangan air, namun para petani tetap membudidayakannya walaupun mereka mengetahui risiko yang akan terjadi. Bila daerah tersebut

gagal memproduksi hasil pertanian maka ketersediaan pangan di daerah tersebut akan terganggu sehingga daerah tersebut terjadi kerawanan pangan. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji kondisi kerawanan pangan di tingkat wilayah/daerah rawan banjir Kabupaten Bojonegoro.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian adalah riset eksploratori yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau identifikasi mengenai ketahanan pangan rumah tangga petani di daerah rawan banjir di Kabupaten Bojonegoro. Dalam eksploratori diperoleh data kualitatif yang sifatnya mendalam dan kontekstual serta data kuantitatif. Metode yang digunakan adalah survei yaitu penelaahan informasi dari berbagai dimensi pada objek penelitian. Metode pendekatannya menggunakan *cross sectional study* yaitu suatu penelitian yang dilakukan hanya pada satu waktu tertentu tanpa melakukan suatu perlakuan pada objek sehingga menghasilkan potret situasi pada saat tertentu.

Artikel ilmiah ini merupakan bagian dari laporan hasil penelitian hibah bersaing yang berjudul "Model Pengembangan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani pada Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Bojonegoro" tahun 2012 dengan tim peneliti Suprapti S, *et.all*. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu disesuaikan dengan pembagian daerah terkena banjir menurut Bakorlak Kabupaten Bojonegoro. Pembagian daerah banjir dibagi menjadi 3 wilayah yaitu wilayah barat diwakili Kecamatan Malo, wilayah tengah diwakili Kecamatan Trucuk dan wilayah timur diwakili Kecamatan Balen. Kecamatan-kecamatan tersebut diambil berdasarkan luas genangan yang menggenangi rumah penduduk dan areal pertanian (sawah dan ladang).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari BPS, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Bakorlak Kabupaten Bojonegoro dan instansi lain yang terkait. Untuk mengidentifikasi kerawanan pangan di tingkat wilayah dilakukan dengan analisis Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG tersebut dilihat dari sektor pertanian, sektor kesehatan dan sektor ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Kondisi Kerawanan Pangan di Tingkat Kabupaten

Rachman dan Ariani (2002) mengungkapkan bahwa konsep dan pengertian atau definisi ketahanan pangan tersebut intinya terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Terkait dengan konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan individu tersebut perlu pula diperhatikan aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal, serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. Dalam perumusan kebijakan maupun kajian empiris ketahanan pangan, penerapan konsep ketahanan pangan tersebut perlu dikaitkan dengan sistem hirarki sesuai dimensi sasaran dimulai dari tingkat individu, rumah tangga, masyarakat/komunitas, regional, nasional maupun global. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga maupun wilayah/daerah, ditentukan oleh berjalannya sistem ketahanan pangan pada rumah tangga, daerah/wilayah yang bersangkutan. Apabila sistem ketahanan pangan yang meliputi sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi secara sinkron berjalan bersama dan lancar maka ketersediaan pangan yang ada pada rumah tangga ataupun wilayah dan daerah tetap tercukupi.

Potensi wilayah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan seseorang terhadap pangannya. Ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat menjadi salah satu indikator dalam mengetahui ketahanan pangan wilayah tersebut. SKPG adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui

situasi pangan dan gizi masyarakat dan praktiraan kejadian kerawanan pangan.

SKPG dilihat dari indikator sektor pertanian dihitung dengan indikator produksi Setara Beras (PSB). Indikator ini diperhitungkan dari dukungan penerimaan sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan Produksi Setara Beras (PSB) dalam memenuhi keperluan pangan pokok. Kemudian dihitung jumlah ketersediaan pangan pokok PSB (beras dan non beras) yang merupakan penjumlahan semua ketersediaan pangan baik dari beras dan non beras yang ada di wilayah (desa/kecamatan) yang diamati. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah PSB atau Produksi Setara Beras adalah 477.007,13 dan memiliki skor 1. Artinya adalah rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras adalah mengalami surplus yaitu $> 1,14$.

Indikator sektor kesehatan dihitung dengan prevelensi KEP (Kurang Energi Protein). KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah KEP adalah sebesar 9.805,00 atau 11,66 % dan memiliki skor 1. Artinya adalah prevelensi KEP < 20 %.

Indikator sektor ekonomi menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro adalah 345.038 dan jumlah Kepala Keluarga yang miskin adalah 128.981 atau 37,36% dan memiliki skor 3. Artinya bahwa jumlah prosentase keluarga miskin berkisar antara 30 % - 39,99%. Skoring dari ketiga indikator (pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi) tersebut dijumlah menunjukkan total skor gabungan adalah 5. Artinya adalah hasil analisis SKPG di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kondisi aman dari kerawanan pangan dan gizi, sehingga memiliki warna hijau dalam peta ketahanan pangan.

Secara umum kondisi Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat berdasarkan hasil analisis SKPG. Hasil analisis SKPG dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis SKPG Kabupaten Bojonegoro pada Bulan Desember 2011

No.	Kecamatan	Sektor Pertanian		Sektor Kesehatan		Sektor Ekonomi		Total Skor		Warna		
		PSB	Skor	KEP	%	Skor	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	%		Skor	Gabungan
1	Margomulyo	5.759,26	1	165	11,4	1	6.107	2.088	34,19	3	5	HIAU
2	Ngraho	13.395,25	1	395	14,59	1	11.560	5.648	48,86	4	6	KUNING
3	Tambakrejo	18.454,88	1	338	9,57	1	15.218	4.974	32,68	3	5	HIAU
4	Ngambon	2.507,51	1	46	5,77	1	3.420	1.254	36,67	3	5	HIAU
5	Sekar	7.145,34	1	333	18,87	1	6.881	4.350	63,22	4	6	KUNING
6	Bubulan	4.516,14	1	139	14,62	1	3.973	990	24,92	2	4	HIAU
7	Gondang	7.329,62	1	149	9,92	1	7.075	3.682	52,04	4	6	KUNING
8	Temayang	10.374,28	1	250	11,6	1	10.258	3.584	34,94	3	5	HIAU
9	Sugihwaras	20.784,08	1	493	17,71	1	13.477	4.105	30,46	3	5	HIAU
10	Bojonegoro	6.856,49	1	304	5,89	1	21.820	4.522	20,72	2	4	HIAU
11	Trucuk	8.153,69	1	303	11,4	1	10.113	3.618	35,78	3	5	HIAU
12	Ngasem	23.716,90	1	497	9,4	1	20.618	10.165	49,30	4	6	KUNING
13	Kedungadem	52.582,86	1	758	14,62	1	20.807	7.060	33,93	3	5	HIAU
14	Kepohbaru	40.340,95	1	517	11,42	1	17.191	7.433	43,24	4	6	KUNING
15	Baureno	26.121,76	1	570	10,04	1	19.731	8.367	42,41	4	6	KUNING
16	Kanor	42.307,12	1	602	15,72	1	16.437	6.555	39,88	3	5	HIAU
17	Sumberrejo	27.942,30	1	633	14,05	1	21.024	10.465	49,78	4	6	KUNING
18	Balen	14.322,16	1	486	12,01	1	18.242	7.485	41,03	4	6	KUNING
19	Sukosewu	20.094,98	1	340	12,81	1	12.068	3.283	27,20	2	4	HIAU
20	Kapas	10.360,66	1	490	14,27	1	13.786	3.812	27,65	2	4	HIAU
21	Kalitidu	39.292,42	1	438	10,92	1	16.841	6.046	35,90	3	5	HIAU
22	Padangan	10.628,87	1	135	4,11	1	11.092	3.792	34,19	3	5	HIAU
23	Dander	29.296,98	1	683	12,43	1	20.118	5.553	27,60	2	4	HIAU
24	Malo	8.385,59	1	205	8,51	1	8.384	3.966	47,30	4	6	KUNING
25	Purwosari	12.111,69	1	238	11,05	1	7.586	2.614	34,46	3	5	HIAU
26	Kasiman	11.034,46	1	200	10,44	1	7.994	2.726	34,10	3	5	HIAU
27	Kedewan	3.190,89	1	98	11,57	1	3.217	844	26,24	2	4	HIAU
JUMLAH		477.007,13	1	9805,00	11,66	1	345.038	128.981	37,36	3	5	HIAU

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, 2011

Keterangan : PSB = Produksi Setara Beras, KEP = Kurang Energi protein

Pemetaan Kondisi Kerawanan Pangan di Tingkat Kecamatan Terpilih

Berdasarkan klasifikasi pemetaan ketahanan pangan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa dari 28 kecamatan hanya sebanyak 9 kecamatan yang berwarna kuning, sedangkan 19 kecamatan lainnya berwarna hijau. Sebanyak 9 kecamatan yang memiliki peta ketahanan pangan berwarna kuning menunjukkan bahwa daerah tersebut kurang baik kondisi ketahanan pangannya. Dari 19 kecamatan yang merupakan gambaran secara umum dari Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah tersebut adalah baik.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Trucuk, Balen, dan Malo. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Kecamatan Trucuk untuk indikator sektor pertanian dihitung dengan indikator produksi Setara Beras (PSB). Indikator ini diperhitungkan dari dukungan penerimaan sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan Produksi Setara Beras (PSB) dalam memenuhi keperluan pangan pokok. Kemudian dihitung jumlah ketersediaan pangan pokok PSB (beras dan non beras) yang merupakan penjumlahan semua ketersediaan pangan baik dari beras dan non beras yang ada di wilayah (desa/kecamatan) yang diamati. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah PSB atau Produksi Setara Beras adalah 8.153,69 dan memiliki skor 1. Artinya adalah rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras adalah mengalami surplus yaitu $> 1,14$. Indikator sektor kesehatan dihitung dengan prevelensi KEP (Kurang Energi Protein). KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah KEP adalah sebesar 303 atau 11,40 % dan memiliki skor 1. Artinya adalah prevelensi KEP < 20 %. Indikator sektor ekonomi menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro adalah 10.113 dan jumlah Kepala Keluarga yang miskin adalah 3.618 atau 35,78% dan memiliki skor 3. Artinya bahwa jumlah prosentase keluarga miskin berkisar

antara 30 % - 39,99%. Skoring dari ketiga indikator (pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi) tersebut dijumlah menunjukkan total skor gabungan adalah 5. Artinya adalah hasil analisis SKPG di Kecamatan Trucuk menunjukkan kondisi aman dari kerawanan pangan dan gizi, sehingga memiliki warna hijau dalam peta ketahanan pangan.

Kecamatan Balen untuk indikator sektor pertanian dihitung dengan indikator Produksi Setara Beras (PSB). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah PSB atau Produksi Setara Beras adalah 14.322,16 dan memiliki skor 1. Artinya adalah rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras adalah mengalami surplus yaitu $> 1,14$. Indikator sektor kesehatan dihitung dengan prevelensi KEP (Kurang Energi Protein). KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah KEP adalah sebesar 486 atau 12,01 % dan memiliki skor 1. Artinya adalah prevelensi KEP < 20 %. Indikator sektor ekonomi menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro adalah 18.242 dan jumlah Kepala Keluarga yang miskin adalah 7.485 atau 41,03% dan memiliki skor 4. Artinya bahwa jumlah prosentase keluarga miskin berkisar antara 40 % - 49,99%. Skoring dari ketiga indikator (pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi) tersebut dijumlah menunjukkan total skor gabungan adalah 6. Artinya adalah hasil analisis SKPG di Kecamatan Balen menunjukkan kondisi waspada dari kerawanan pangan dan gizi, sehingga memiliki warna kuning dalam peta ketahanan pangan.

Kecamatan Malo untuk indikator sektor pertanian dihitung dengan indikator Produksi Setara Beras (PSB). Indikator ini diperhitungkan dari dukungan penerimaan sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan Produksi Setara Beras (PSB) dalam memenuhi keperluan pangan pokok. Kemudian dihitung jumlah ketersediaan pangan pokok PSB (beras dan non beras) yang merupakan penjumlahan semua ketersediaan pangan baik dari beras dan non beras

yang ada di wilayah (desa/kecamatan) yang diamati. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah PSB atau Produksi Setara Beras adalah 8.385,59 dan memiliki skor 1. Artinya adalah rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras adalah mengalami surplus yaitu $> 1,14$. Indikator sektor kesehatan dihitung dengan prevalensi KEP (Kurang Energi Protein). KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah KEP adalah sebesar 205 atau 8,51 % dan memiliki skor 1. Artinya adalah prevalensi KEP < 20 %. Indikator sektor ekonomi menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro adalah 8.384 dan jumlah Kepala Keluarga yang miskin adalah 3.966 atau 47,30% dan memiliki skor 4. Artinya bahwa jumlah prosentase keluarga miskin berkisar antara 40 % - 49,99%. Skoring dari ketiga indikator (pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi) tersebut dijumlah menunjukkan total skor gabungan adalah 6. Artinya adalah hasil analisis SKPG di Kecamatan Balen menunjukkan kondisi waspada dari kerawanan pangan dan gizi, sehingga memiliki warna kuning dalam peta ketahanan pangan, sedangkan warna merah menunjukkan kondisi rawan pangan.

Usaha-usaha yang telah Ditempuh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Tingkat Wilayah

Ketahanan pangan rumah tangga petani di Kabupaten Bojonegoro akan ditingkatkan agar peta ketahanan pangan berwarna hijau semua. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah merencanakan pembangunan lumbung pangan di setiap desa dan kelurahan. Lumbung pangan di Kabupaten Bojonegoro baru ada satu di Kecamatan Malo.

Selain lumbung pangan, program lain dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat wilayah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah:

1). Membentuk desa mandiri pangan

Program desa mandiri pangan ini telah dimulai sejak tahun 2006 sampai sekarang ini dimana sudah terdapat 8 desa di wilayah Bojonegoro yang mendapat program tersebut. Kriteria desa yang mendapat program ini salah satunya adalah bahwa di desa tersebut terdapat minimal 30 persen kepala keluarga (KK) dari total KK tergolong miskin. Dalam desa mandiri pangan, kegiatan yang dilaksanakan adalah menggerakkan 3 aspek ketahanan pangan yaitu akses terhadap pangan, penyediaan dan konsumsi pangan agar terjamin dan terpenuhi di tingkat rumah tangga dan wilayah tersebut. Program lainnya adalah membentuk kelompok afinitas-afinitas dengan memberikan modal untuk meningkatkan daya beli rumah tangga miskin.

2). Diversifikasi pangan

Dalam diversifikasi pangan, program yang dilakukan melalui Program Percepatan Penganekaragaman Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Diharapkan dari program ini dapat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Selain itu, program lain yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan alat penepung untuk umbi-umbian sebagai diversifikasi pangan pokok selain beras.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemetaan kondisi kerawanan pangan di tingkat wilayah/daerah rawan banjir menunjukkan bahwa dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro hanya sebanyak 9 kecamatan yang berwarna kuning, sedangkan 19 kecamatan lainnya berwarna hijau. Sebanyak 9 kecamatan yang memiliki peta ketahanan pangan berwarna kuning menunjukkan bahwa daerah tersebut kurang baik kondisi ketahanan pangannya. Dari 19 kecamatan yang merupakan gambaran secara umum dari Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah tersebut adalah baik.

Ketahanan pangan di tingkat wilayah Kabupaten Bojonegoro ditempuh dengan akan didirikannya lumbung pangan di seluruh desa, pembentukan desa mandiri pangan dan program P2KP (Program Percepatan Penganekaragaman Pangan).

Meningkatkan kondisi ketahanan pangan di tingkat kecamatan yang berwarna kuning menjadi hijau di sembilan kecamatan dengan cara : 1) menurunkan jumlah kepala keluarga miskin, hal ini dapat ditempuh dengan mencari penghasilan tambahan di luar pertanian pada waktu terjadi banjir, 2) mendirikan lumbung pangan di tingkat desa sebagai antisipasi jika terjadi banjir. Partisipasi masyarakat desa khususnya petani di desa tersebut dalam pengisian dan kegiatan lumbung desa, 3) pembentukan desa mandiri pangan dimana masyarakat di desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam program desa mandiri pangan perlu untuk ditingkatkan mengingat sekarang ini ketergantungan pangan pokok beras sangat tinggi di tingkat rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemda Kab Bojonegoro. *Profil Kabupaten Bojonegoro*. www.bojonegoro.go.id
- Agustono. 2011. *Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan dan Stabilitas Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bojonegoro*. *Jurnal SEPA Vol 8 No 1 September 2011*. Kerjasama Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/ Agrobisnis Fakultas Pertanian UNS dengan PERHEPI Komisariat Surakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2011. *Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro*. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
- Harper, L.J, B.J Deaton., J.A. Doiskel. 1986. *Pangan, Gizi dan Pertanian* (Diterjemahkan oleh Suhardjo). UI Press. Jakarta
- Rachman, H. dan M. Ariani. 2002. *Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi*. Forum Agro Ekonomi. Vol. XX/No. 1: 12-24. Jakarta.
- Soetrisno, N, 1995, “Ketahanan Pangan Dunia: Konsep, Pengukuran dan Faktor Dominan” dalam *Pangan Nomor 21 Vol. V, 1995*. Jakarta.
- Suprpti S, Erlyna Wida R dan Aulia Qonita. 2012. *Model Pengembangan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani pada Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Bojonegoro*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNS. Surakarta.
- Suryana, A. 2003. *Kapita Selekta : Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
-